

**PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN
NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL TENTANG
PENGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI OLEH
MASYARAKAT MAMPU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

IHYA NIZAM MUHAMMAD
21103060031

PEMBIMBING:

ASSOC. PROF. H. WAWAN GUNAWAN, S.AG., M.AG.
19651208 199703 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penggunaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu masih menjadi polemik di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bantul. Fenomena ini menimbulkan problematika dalam masyarakat, terutama ketika masyarakat mampu justru dengan mudah memanfaatkan subsidi tersebut. Disisi lain pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penghentian distribusi ditingkat pengecer, lalu kemudian disusul fatwa MUI yang menyatakan dengan jelas keharaman bagi masyarakat mampu menggunakan gas elpiji bersubsidi. Dalam penelitian ini, pandangan dari tokoh organisasi kemasyarakatan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi penting untuk dikaji, karena keduanya memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral masyarakat. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup keabsahan penggunaan subsidi oleh kelompok yang tidak berhak, yaitu golongan masyarakat selain dalam kriteria yang diperbolehkan menggunakan subsidi, serta nilai keadilan distribusi dalam Islam, serta implikasi moral dan sosial dari praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Maqasid al-Syari'ah untuk menganalisis pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait penggunaan elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis-komparatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 5 tokoh masing-masing organisasi, lapangan, serta studi literatur yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian pandangan keagamaan terhadap kebijakan subsidi energi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Maqasid al-Syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tokoh Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama secara umum sepakat bahwa penggunaan elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu merupakan bentuk ketidakadilan dan penyimpangan moral yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pandangan Muhammadiyah cenderung lebih tegas, normatif, dan berorientasi pada pembenahan struktural, sementara NU lebih fleksibel, kontekstual, dan menekankan pada pendekatan sosial-kultural serta edukatif. Meskipun pendekatan keduanya berbeda, namun keduanya menekankan pentingnya distribusi yang adil, tanggung jawab sosial, dan perlunya regulasi yang lebih tegas dari pemerintah agar subsidi tepat sasaran.

Kata Kunci: gas elpiji bersubsidi, keadilan sosial, masyarakat mampu, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Maqasid al-Syari'ah.

ABSTRACT

The use of subsidized 3-kilogram LPG gas which should be intended for the poor is still a polemic in Indonesia, including in Bantul Regency. This phenomenon causes problems in society, especially when the wealthy can easily take advantage of the subsidy. On the other hand, the government issued a policy related to the termination of distribution at the retail level, followed by a fatwa from the MUI which clearly stated that it is forbidden for the wealthy to use subsidized LPG gas. In this study, the views of Islamic community organization figures such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are important to study, because both have a strategic role in shaping the moral awareness of society. The issues raised in this study include the legitimacy of the use of subsidies by groups who are not entitled, the value of distribution justice in Islam, and the moral and social implications of the practice.

This study uses the Maqāṣid al-Syari'ah theory to analyze the views of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures regarding the use of subsidized LPG by the wealthy. This type of research is qualitative with descriptive-analytical-comparative research nature. Data collection techniques are carried out through interviews with figures from each organization, field observations, and literature studies aimed at collecting information from secondary sources. This study aims to describe the suitability of religious views on energy subsidy policies and community behavior in the perspective of Maqāṣid al-Syari'ah.

The results of the study show that both Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama figures generally agree that the use of subsidized LPG by the community is a form of injustice and moral deviation that is contrary to Islamic values. Muhammadiyah's view tends to be more assertive, normative, and oriented towards structural improvement, while NU is more flexible, contextual, and emphasizes a socio-cultural and educational approach. Although the approaches of both are different, both emphasize the importance of fair distribution, social responsibility, and the need for stricter regulations from the government so that subsidies are right on target.

Keywords: subsidized LPG gas, social justice, wealthy society, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Maqāṣid al-Syari'ah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Surat Persetujuan Skripsi

Hal: Skripsi Saudara Ihya Nizam Muhammad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihya Nizam Muhammad

NIM : 21103060031

Judul : Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi oleh Masyarakat Mampu

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Pembimbing,



Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-699/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI
OLEH MASYARAKAT MAMPU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHYA NIZAM MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060031
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6853c3ade4e6



Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hom.
SIGNED

Valid ID: 6853da267355



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6853da91a44b



Yogyakarta, 18 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858c21be1655

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Nama : Ihya Nizam Muhammad

NIM : 21103060031

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi oleh Masyarakat Mampu" adalah asli, hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya, dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ihya Nizam Muhammad

NIM. 21103060031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“JANGAN TAKUT UNTUK MEMULAI HAL BARU”

“Terkadang perlu banyak melewati cobaan dan kegagalan terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan suatu puncak pencapaian itu, agar kita memaknai betapa berharganya sebuah proses hidup yang sudah dilewati hingga mencapai titik Puncak tersebut”

“Terkadang dalam hidup ini kita akan menemukan orang yang sulit dicari keistimewaanya, namun juga sulit mencari penggantinya. Itulak mengapa kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena siapapun bisa menjadi apapun.”

Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, Akan tetapi kebahagiaan menjadi kunci dari setiap kesuksesan. Maka bahagialah dengan apa yang kamu miliki.

“Bahagia itu sederhana”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, dan dukungan yang tiada henti. Setiap pencapaian saya adalah buah dari jerih payah dan pengorbanan kalian.
2. Para guru, dan dosen yang mulia, Terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan arahan yang telah membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik.
3. Almamater tercinta, Sebagai tempat belajar dan bertumbuh, semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi kecil saya untuk ilmu pengetahuan.

Semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat menjadi langkah awal untuk memberi keberkahan dan manfaat yang lebih luas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan literatur dari satu bahasa ke dalam literatur bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan literatur Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsoanan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketemu ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

1.	َ	Fathah	ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْشَاءٌ	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِ	ditulis ditulis	ī <i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>‘ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الْإِسْلَام	Ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penelitipanjatkan atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat kesehatan, kelancaran kebahagiaan, rahmat, taufik, *inayah* dan *hidayah*-NYA sehingga peneliti sangat bersyukur masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini dengan judul **Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi oleh Masyarakat Mampu** ini bisa diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa berterima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. H. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag. beserta Wakil Dekan I, II dan II dan staf.
3. Kepala Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Hj. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
4. Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Ibu Surur Roiqih, M.H.

5. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan dukungan serta masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak/Ibu staf Pengajar/Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya prodi Perbandingan Mazhab atas ilmu dan dedikasinya selama peneliti menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak dr. H. Atthobari, M.Ph., Sp.Mk., dan Ibu Hj. Ashlihatul Lathifah S.Ag., M.S.I., yang telah dan selalu memberikan do'a, semangat serta dukungan apapun baik secara moral maupun materiil.
8. Narasumber dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul yaitu H. Sugeng Prihatin, SH (Wakil Ketua PDM Bantul), Drs. H. Bambang Inanta, M.SI (Wakil Ketua PDM Bantul), H. Suwandi Danusubroto (Wakil Ketua PDM Bantul), H. Aris Samsugito, S.Ag (Sekretaris PDM Bantul), dan Chusnul Azhar, M.Pd.I. (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Bantul) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Narasumber dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul yaitu Drs. KH. Damanhuri (Rois Syuriah PCNU Bantul), Drs. KH. Syahroini Djamil (Katib Syuriah PCNU Bantul), Prof. Dr. H. Riyanta,

M.Hum. (Ketua Tanfidziyah PCNU Bantul), Drs. H. Marhadi Fuad, M.SI. (Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Bantul), dan Dr. KH. Anis Masduqi, Lc., M.Si (Ketua Lembaga Bahtsul Masail PWNu DIY) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dengan sangat ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

10. Kepada teman-teman yang telah menjadi motivator dalam kebaikan dan senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti di setiap langkah perjuangan akademik ini.
11. Serta untuk seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis, yang tidak penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bernilai sangat peneliti harapkan. Akhir kata, peneliti memohon ridha Allah SWT. Atas segala usaha ini, seraya berharap skripsi ini dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat dalam pengembangan ilmu fiqh muamalah dan teknologi keuangan Syari'ah.

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Hormat saya,

Ihya Nizam Muhammad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
TEORI MAQAŞID AL-SYARI’AH DAN PENGGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI OLEH MASYARAKAT MAMPU.....	21
A. Teori Maqaşid al-Syari’ah	21
B. Gas Elpiji Bersubsidi.....	36
C. Masyarakat Mampu	43
BAB III.....	53
PENGGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI MENURUT TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL	53

A. Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul	53
B. Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Menurut Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul	60
BAB IV	72
ANALISIS PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI OLEH MASYARAKAT MAMPU	72
A. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Tentang Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi Bagi Masyarakat Mampu.....	72
B. Persamaan Dan Perbedaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Tentang Penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu	82
C. Analisis penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi oleh Masyarakat Mampu menurut Teori Kemiskinan Sajogyo	91
BAB V.....	94
PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gas elpiji 3 kg bersubsidi merupakan salah satu program subsidi yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Program ini dirancang untuk membantu rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil agar dapat mengakses energi dengan harga yang terjangkau. Namun, dalam praktiknya, program subsidi ini sering kali tidak tepat sasaran. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% hingga 40% dari total subsidi gas elpiji 3 kg justru dinikmati oleh kalangan mampu atau orang kaya.¹ Fenomena ini menciptakan ketidakadilan sosial dan mengurangi efektivitas kebijakan subsidi tersebut. Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi dan mereka yang tidak berhak. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa subsidi yang seharusnya menjadi hak kelompok miskin malah dinikmati oleh mereka yang secara ekonomi tidak membutuhkan bantuan.²

Pemerintah memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa distribusi gas elpiji bersubsidi dilakukan dengan tepat sasaran. Pemerintah telah menerapkan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, 26 Agustus). *Sri Mulyani: 68 persen konsumsi LPG 3 kg dinikmati orang mampu*. ANTARA News. Diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/3082193/sri-mulyani-68-persen-konsumsi-lpg-3-kg-dinikmati-orang-mampu>, pada tanggal 18 Juni 2025

² Lya Novaria Nainggolan dkk, "Tinjauan kebijakan pemerintah bagi masyarakat prasejahtera dalam menghadapi fenomena subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan gas di Indonesia", *Jurnal ekonomi pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol.10, No.1, (Juni 2024), hlm.125

berbagai regulasi untuk membatasi penggunaan gas elpiji 3 kg hanya kepada kelompok masyarakat tertentu yang memenuhi kriteria sebagai penerima subsidi. Di beberapa daerah pemerintah setempat sudah ada yang mengambil Langkah terkait pelarangan penggunaan gas bersubsidi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti contoh di Provinsi Jawa Tengah.³

Baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem distribusi pada gas elpiji bersubsidi yang membuat gaduh masyarakat. Kegaduhan tentang gas elpiji bersubsidi ini dampak dari dihapusnya sistem distribusi di tingkat pengecer, sehingga masyarakat harus jauh-jauh untuk membeli gas ke pangkalan. Hasil dari kebijakan ini muncul fenomena antrian yang Panjang dampak dari kelangkaan gas. Pemerintah menetapkan kebijakan ini terkait banyak dari para pengecer bertindak curang dengan memainkan harga yang jauh lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET),⁴ mungkin karena kurangnya kajian atau pendalaman lebih lanjut malah mengakibatkan kesulitan masyarakat itu sendiri dalam mendapatkan gas elpiji bersubsidi. Namun tidak lama kemudian pemerintah atas instruksi dari presiden kembali mengaktifkan sistem distribusi pada pengecer yang kemudian oleh kementerian terkait mengubah para pengecer ini menjadi sub pangkalan dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu.⁵

³ JatengProv.co.id, “Bukan Masyarakat Miskin, Sekda Jateng Larang ASN Gunakan Elpiji 3 Kg”, <https://jatengprov.go.id/publik/bukan-masyarakat-miskin-sekda-jateng-larang-asn-gunakan-elpiji-3-kg>, diakses pada tanggal 18 Juni 2025

⁴ Irfan Kamil dan Jessi Carina, “Sederet alasan pemerintah larang pengecer jual elpiji 3kg”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/03/07432281/ sederet-alasan-pemerintah-larang-pengecer-jual-elpiji-3-kg?page=all>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025

⁵ Adhyasta Dirgantara dan Jessi Carina, “Prabowo beri instruksi pengecer bisa jual elpiji 3kg lagi mulai hari ini”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/09343881/prabowo-beri-instruksi-pengecer-bisa-jual-elpiji-3-kg-lagi-mulai-hari-ini>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025

Kebijakan penghapusan sistem distribusi di tingkat pengecer ini dinilai mendadak dan tergesa-gesa tanpa memikirkan bagaimana kesiapan distribusi dan akses masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Pada awalnya adalah untuk menertibkan harga yang sesuai dengan tujuan awal subsidi dan ditujukan kepada para pengecer yang sering memainkan harga dan ketidaktepatan sasaran penerima gas elpiji subsidi. Sasaran yang dimaksud adalah kelas menengah kebawah pun masih memiliki multitafsir, pada kelas menengah terdapat masyarakat yang rentan miskin disisi lain terdapat masyarakat yang mendekati kelas atas, jadi masih perlu kejelasan kembali masyarakat yang diperbolehkan menggunakan gas elpiji subsidi.⁶

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang keharaman penggunaan gas elpiji 3 kg bersubsidi bagi masyarakat mampu.⁷ Fatwa ini sebagai respons terhadap penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran dan bertujuan untuk menegaskan prinsip keadilan dalam ajaran Islam. Pendapat ini sekaligus menegaskan bahwa subsidi seharusnya hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu,⁸ seperti rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan, dan petani. Fatwa yang disampaikan tersebut tentu membuat gaduh dan menuai pro kontra dari masyarakat. Dalam pandangan MUI, tindakan menggunakan subsidi tanpa hak dianggap sebagai

⁶ Al Hidayat Samsu, "Kelangkaan gas elpiji 3kg: Kebijakan yang tergesa-gesa yang mengorbankan rakyat kecil", <https://mpr.go.id/berita/Kelangkaan-Gas-Elpiji-3-Kg:-Kebijakan-Tergesa-gesa-yang-Mengorbankan-Rakyat-Kecil>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025

⁷ Fatwa ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Miftahul Huda, pada tanggal 6 Februari 2025

⁸ Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2022

pelanggaran terhadap amanah dan prinsip keadilan. Fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi umat Islam tetapi juga sebagai panggilan untuk meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam penggunaan sumber daya. Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan masyarakat mampu akan lebih sadar dan beralih dari penggunaan gas elpiji bersubsidi ke produk non-subsidi seperti gas elpiji 5,5 kg atau 12 kg.⁹

Setelah mengetahui berbagai permasalahan diatas, fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Bantul mengenai penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu. Peneliti tertarik mengambil sudut pandang dari kedua organisasi masyarakat tersebut karena keduanya sampai saat ini belum mengeluarkan fatwa terkait dengan penggunaan gas elpiji bersubsidi ini. Disisi lain keduanya merupakan ormas terbesar di Indonesia dan memiliki kapasitas mengeluarkan fatwa, sehingga pendapat dan fatwa keduanya dapat berpengaruh pada masyarakat luas khususnya bagi para pengikutnya. Kemudian alasan mengapa memilih Kabupaten Bantul sebagai tempat observasi penelitian ini karena melansir dari Harian Jogja, Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk 1.106.992 jiwa terbanyak kedua di Provinsi DIY setelah Kabupaten Sleman sekaligus Kabupaten dengan serapan paling bagus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),¹⁰ sehingga mendapat pasokan tambahan 15 persen dari

⁹ Admin, "Bukan Kategori Miskin tapi gunakan gas dan BBM bersubsidi", <https://www.mui.or.id/baca/berita/bukan-kategori-miskin-tapi-gunakan-gas-dan-bbm-bersubsidi-apa-hukumnya>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, "Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2024-2025", <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics->

tahun sebelumnya. Namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan susah nya mencari gas elpiji 3 kg, gas di tingkat pengecer sudah dibatasi tetapi ketika masyarakat sudah mencari sampai pangkalan tetap tidak tersedia. Artinya pasokan gas elpiji 3 kg masih minim karena terkadang dari pengiriman 100 tabung dalam sehari sudah habis, disisi lain terdapat fenomena *punic buying* yakni masyarakat yang sebelumnya membeli satu tabung ketika mengetahui adanya larangan pengecer gas elpiji 3 kg, maka bisa membeli hingga 2 tabung atau lebih sehingga mengakibatkan stok dipasaran berkurang.¹¹

Penelitian mengenai perbandingan antara Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul terkait penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu menjadi sangat relevan khususnya di Kabupaten Bantul. Dengan memahami bagaimana kedua pandangan ini saling melengkapi dalam mencapai tujuan keadilan sosial, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan energi di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

<table/2/MTMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-yogyakarta-.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025

¹¹ Ujang Hasanudin, "Ini penyebab terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram di Bantul", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/16/511/1204332/ini-penyebab-terjadinya-kelangkaan-elpiji-3-kilogram-di-bantul>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025

1. Bagaimana Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul berdasarkan teori maqāṣid al-syari'ah terkait penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu ?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul terkait penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul berdasarkan teori maqāṣid al-syari'ah terkait penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu.
- b. Mengetahui analisis hukum terkait penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur agama dengan membahas Perbandingan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi bagi masyarakat mampu. Selain memberikan pemahaman mendalam tentang hukum Islam terkait isu kontemporer, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum Islam. Dengan membandingkan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan subsidi dan implikasinya terhadap masyarakat, serta bagaimana pendekatan hukum Islam dapat berkontribusi pada penyelesaian masalah sosial.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang luas, mulai dari pemahaman kepada masyarakat khususnya yang notabene sebagai kelas menengah keatas, serta memberikan panduan bagi pengambil kebijakan untuk merancang regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial, agama, dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah terkait penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg agar lebih tepat sasaran. Dengan memahami pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan subsidi, masyarakat diharapkan akan lebih menghargai bantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman mengenai penggunaan gas elpiji bersubsidi dan dapat dijadikan sebagai sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan sebagai sumber inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, untuk menghindari dari anggapan kesamaan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Pertama, skripsi karya Sandra Rizka Amalia dengan judul “Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”.¹² Dalam penelitian tersebut yang menggunakan metode deskriptif analitis dapat disimpulkan bahwa penetapan harga jual gas elpiji 3 kg di kecamatan teluk segara menjual sesuai HET. Adapun perbedaan harga antara pangkalan gas elpiji menunjukkan bahwa mereka mengikuti mekanisme pasar dimana mereka perlu keuntungan. Penetapan harga jual Gas elpiji 3 kg di tiga pangkalan Kecamatan Teluk Segara dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan untuk pangkalan sebesar Rp 15.300/tabung berdasarkan SK Gubernur No R.227/IV Tahun 2015, Hal ini disebut dengan istilah tas’ir. Tas’ir merupakan penetapan harga yang dilakukan oleh

¹² Amalia, Sandra Rizka, “Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu (2022)

pemerintah karena pertimbangan kemaslahatan secara luas. Untuk mencegah penimbunan dan menghilangkan kezaliman diperbolehkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 59. Dan kesesuaian lima teori indikator penetapan harga menurut pandangan Islam.

Kedua, dalam jurnal karya Fadhilah Bakri dkk. dengan judul Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007).¹³ Dalam penelitian tersebut yang menggunakan metode deskriptif analitis dapat disimpulkan bahwa regulasi pemerintah mengatur distribusi LPG Subsidi sangat ketat, namun terdapat berbagai faktor yang menghambat efektivitas distribusi tersebut, seperti distribusi yang masih terbuka dan juga pengawasan yang lemah. Dari perspektif syariah, penjualan LPG subsidi kepada masyarakat non miskin dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan amanah. Hukum Islam menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama, sehingga tindakan ini harus dicegah dan ditindak tegas sesuai prinsip-prinsip syariah serta hukum pidana yang berlaku.

Ketiga, skripsi karya Eriani dengan judul Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).¹⁴ Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini menunjukkan hasil: (1) Model

¹³ Fadhilah Bakri dkk, "Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007)", *Jurnal kajian Islam: Al Fikroh*, Vol.1 No.1, (Juli 2024)

¹⁴ Eriani, "Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2020)

pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu distribusi tidak langsung. Alur pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Soreang: SPBE ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen/masyarakat. (2) Evaluasi pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Parepare yaitu Operasi Pasar. (3) Tinjauan hukum ekonomi Islam tentang sistem evaluasi pendistribusian gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg di Kecamatan Soreang menunjukkan bahwa kegiatan operasi pasar yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi islam yang ada. Tidak ada unsur gharar, zalim, riba, maisir di dalamnya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Gracia Montolalu dkk. yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.¹⁵ Dalam penelitian yang menggunakan metode normatif dapat disimpulkan yaitu undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum sampai sekarang, dalam undang-undang ini sangat jelas tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah. Pada undang-undang ini juga mengatur tentang ketentuan Pidana serta hukumannya terhadap pelaku tindak pidana, seperti Pidana Penjara dan Pidana Denda sesuai bentuk perbuatan pidana yang dilakukan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peraturan yang mengatur penggunaan tabung gas LPG 3 kg, sanksi yang dikenakan

¹⁵ Gracia Montolalu dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001”, *Jurnal Fakultas Hukum*, UNSRAT, Vol.12 No.5, (November 2024)

terhadap pelanggar, serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan tabung gas tersebut. 2. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas, dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Riana Arisa dengan judul Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.¹⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Filed Research), sedangkan sumber primernya yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh langsung dari masyarakat yang mengonsumsi gas elpiji bersubsidi dan pedagang gas elpiji yang ada di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Praktik jual beli gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu yaitu belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pasal 1 ayat 4 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009. karena yang berhak membeli ataupun mengonsumsinya yaitu rumah tangga dan usaha mikro., (2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu. Sebagaimana hal ini telah dibahas dalam Q.S. Al-Qasas [28] ayat 77, As-Shaff [61] ayat 10, H.R. Muttafaqun Alaihi (dari Said Ibnu Zaid Ra), dan kaidah ushul fiqh.

¹⁶ Riana Arisa, "Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2019)

Keenam, jurnal karya ilmiah yang ditulis oleh Sri Ratna Dewi dkk dengan judul Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3 kg bersubsidi di Kota Batam.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, sumber informasi yang di peroleh dari staf (disperindag) kota Batam yang membidangi pengawasan dan terkait kegiatan Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Disperindag Kota Batam belum secara optimal melakukan pengawasan dimana masih ditemukan pelanggaran dalam pendistribusian Gas LPG bersubsidi seperti penjualan tidak tepat sasaran sehingga Gas LPG bersubsidi dapat digunakan oleh siapa saja. Oleh karena itu kerjasama berbagai pihak khususnya Disperindag dengan masyarakat harus ditingkatkan sehingga penyimpangan tidak terjadi dalam pendistribusian Gas LPG bersubsidi yang pada akhirnya menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Ketujuh, jurnal ilmiah karya Siti Hajar dan Nuraini dengan judul Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan.¹⁸ Penelitian ini untuk menganalisis kepatuhan pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas terhadap HET yang telah ditetapkan pemerintah dalam penjualan gas subsidi di Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan dengan

¹⁷ Sri Ratna Dewi dkk, "Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3kg bersubsidi di Kota Batam", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Universitas Internasional Batam, Vol.10, No.1, (Juni 2023)

¹⁸ Siti Hajar dan Nuraini, "Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan", *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No.1, (2024)

menggunakan pendekatan yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Desa Seuneubok, Kec. Pasie Raja, Kab. Aceh Selatan. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 28 pangkalan gas LPG 3 kg di Kabupaten Aceh Selatan. Hasil penelitian didapatkan adalah Kendala yang dialami oleh PT. Kuta Naga Gas dalam pengelolaan gas lpg 3 kg di Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan, yang meliputi (a) rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemahaman mengenai peruntukan gas lpg 3 kg hanya untuk masyarakat kurang mampu saja (b) suplay gas lpg 3 kg ada kalanya terlambat karena jarak angkut yang jauh (c) ketersediaan dan kelengkapan ada kadang-kadang kosong di pangkalan sehingga masyarakat yang membutuhkan sering tidak terpenuhi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang akan dikaji kali ini terfokus pada sudut pandang penggunaan gas elpiji bersubsidi yang lebih spesifik kepada pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama di Kabupaten Bantul, dengan analisis Maqasid al-Syari'ah yang mana setelah peneliti lakukan observasi belum ada penelitian yang mengkaji sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik merupakan serangkaian teori atau konsep yang akan berfungsi sebagai instrumen analisis untuk menyelidiki atau membedah secara mendalam permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Maqasid al-Syari'ah.

Maqasid al-Syari'ah secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya

untuk menjaga kemaslahatan manusia.¹⁹ Adanya Maqāṣid al-Syari'ah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.

Menurut teori Maqāṣid al-Syari'ah Imam Asy-Syatibi membaginya dalam tiga kategori yaitu: Ḍaruriyat (hak primer), Hajiyyat (hak sekunder), dan Tahsiniyyat (hak tersier).²⁰ Dan dalam kebutuhan ḍaruriyyat terdapat perlindungan yang harus dijaga yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal pikiran.²¹ Teori Maqāṣid al-Syari'ah diaplikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap aspek-aspek penting seperti (Hifz al-Din) agama, jiwa (Hifz al-Nafs), akal (Hifz al-'Aql), keturunan (Hifz al-Nasl), dan harta (Hifz al-Mal).²² Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mencakup aspek perlindungan terhadap Hifz al-Din (menjaga agama) dan Hifz al-Mal (menjaga harta), yang termasuk dalam tingkatan kemaslahatan yaitu kebutuhan ḍaruriyyat.²³

Oleh karena itu, Dengan mempertimbangkan bahwa kasus gas elpiji bersubsidi bisa berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup, yang dimana termasuk dalam kebutuhan ḍaruriyyat, maka peneliti ingin menggunakan teori

¹⁹ Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15, No.1, (2021): 29-38.

²⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat. Jilid 2*, (Lebanon: al-Risalah al-Nasirun, 2022), hlm.337

²¹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Al-daulah*, Vol.4, No.2, (Desember 2015), hlm. 297

²² *Ibid*, Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat. Jilid 2*, ...hlm.339

²³ Abdurrahman Kasdi, "Maqāṣid al-Syāri'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.1, (Juni 2014), hlm 56-57

Maqāṣid al-Syari'ah untuk mengeksplorasi apakah kebijakan terkait gas elpiji bersubsidi ini sudah sesuai dengan pendapat kedua tokoh tersebut.

Dalam konteks ini, Maqāṣid al-Syari'ah digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang berkaitan dengan penggunaan gas Elpiji 3 kg bersubsidi serta dampaknya, baik itu dari pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Sejauh ini yang menjadi rujukan penulis terkait regulasi gas elpiji bersubsidi adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran,²⁴ karena untuk kebijakan terkait larangan distribusi tingkat pengecer tersebut masih dalam tahap perumusan. Perbandingan antara pendekatan hukum yang diambil oleh Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul ini akan mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian hukum serta dampak sosial ekonomi dan implikasinya terhadap masyarakat dimasa mendatang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian lapangan (Field Research), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber- sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci

²⁴ Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran

fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek tersebut. Khususnya, gambaran fenomena dan fakta yang berhubungan dengan perbandingan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi bagi masyarakat mampu. Di sisi lain, elemen analisis dari penelitian ini melibatkan koleksi dan organisasi data secara terstruktur, yang kemudian dianalisis secara teliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan mengeksplorasi implikasi dari informasi yang diperoleh.²⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis komparatif. Yakni peneliti mendeskripsikan fenomena yang terjadi, yaitu penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu dan menjelaskan pendapat dari para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai suatu fenomena atau permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait dengan objek penelitian.²⁶ Sedangkan penelitian komparatif adalah metode penelitian untuk mengetahui apakah variabel-variabel tersebut memiliki perbedaan.²⁷ kemudian menganalisis dan membandingkan mengenai

²⁵ Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 104.

²⁶ Djoni S Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, (2021), hlm.21

²⁷ *Ibid*, hlm.24

bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul tentang penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi bagi masyarakat mampu menggunakan pendekatan *Maqasid al-Syari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mengkaji dasar hukum penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi bagi masyarakat mampu. Peneliti menggunakan pendekatan normatif karena ingin berfokus pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang seharusnya diterapkan dalam penggunaan gas elpiji bersubsidi. Selain itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan etika dalam penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu. Dengan mengedepankan analisis teoretis, penelitian ini dapat menilai relevansi penggunaan gas elpiji bersubsidi dalam kerangka Syari'ah. Pendekatan ini juga membantu untuk memahami posisi penggunaan gas elpiji dalam konteks Maqasid al-Syari'ah, yang menjadi landasan utama dalam penentuan hukum Islam terkait kebijakan energi dan kesejahteraan sosial.²⁸

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, (2021), hlm.105

sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan Primer, yaitu data yang didapatkan dari pengamatan langsung dilapangan. Sumber data didapatkan secara langsung dari sumbernya atau dari lapangan melalui wawancara langsung pada 5 tokoh dari kedua ormas yang terkait dalam penelitian. Maka dari itu pihak yang terkait para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul.
- b. Bahan Sekunder, bahan ini terdiri dari kitab-kitab fikih, buku, artikel jurnal, undang-undang atau karya-karya lain yang relevan dengan topik penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, yang ditujukan untuk menghimpun informasi dari sumber-sumber sekunder. Proses studi literatur ini mencakup pengumpulan sejumlah besar dokumen hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dengan mengandalkan pada data sekunder, langkah-langkah pengumpulan data termasuk seleksi, evaluasi, dan penyusunan sistematis dari literatur dan dokumen yang terkait. Materi sekunder ini, yang meliputi bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang diambil dari sumber literatur, kemudian diolah dengan teratur untuk menyajikan analisis yang mendalam dan kategorisasi yang akurat.²⁹

5. Analisis data

²⁹ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 2.

Dalam analisis data, setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, penulis mengolah data secara sistematis. Analisis yang digunakan penyusun bersifat kualitatif, yakni data tidak berbentuk angka melainkan data berupa informasi atau keterangan saja. Analisis secara deskriptif komparatif berupa pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul. Data-data terkait dengan tema penelitian yang telah terhimpun dianalisis dengan menerapkan teori Maqasid al-Syari'ah. Selanjutnya akan diketahui adanya beberapa perbedaan yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan analisa dan langkah akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan mengenai penggunaan Gas Elpiji Bersubsidi bagi masyarakat mampu menurut pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan pembaca dalam menelaah dan memahami disusunlah sebuah sistematika pembahasan yang akan disusun dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menggambarkan kerangka pemikiran penyusun dalam melakukan penelitian serta dalam upaya menemukan masalah secara sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini mengemukakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang Maqāṣid al-Syari'ah sebagai analisis dalam menilai penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu.

Bab ketiga yakni menguraikan gambaran umum tentang kontroversi penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu, . Hal ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui lebih lanjut manfaat dan mudharat dari penggunaan gas elpiji bersubsidi bagi masyarakat mampu dalam studi perbandingan pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Bab keempat merupakan isi pokok dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, sekaligus menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, kemudian analisis dari hasil dari pandangan para Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Kabupaten bantul terkait tema yang diangkat oleh penulis. Dalam bab ini juga berisi tentang analisis dari teori Maqāṣid al-Syari'ah.

Bab kelima yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan beberapa poin dari permasalahan yang telah diuraikan di antaranya:

1. Penelitian ini menemukan bahwa tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (Nahdlatul Ulama) sepakat bahwa subsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai bentuk perlindungan terhadap kebutuhan dasar hidup, dan bukan untuk masyarakat mampu yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Gas elpiji dipandang sebagai kebutuhan pokok yang masuk dalam kategori *ḍharuriyyat* dalam *Maqāṣid al-syarī'ah*. Para tokoh Muhammadiyah menekankan penggunaan gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu ini pada pelanggaran prinsip *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-mal* (perlindungan harta), yang mana penerapan dari kedua prinsip ini sulit untuk dicari celah hukumnya. Sedangkan para tokoh Naahdlatul Ulama lebih menekankan pada prinsip *Hifz al-din* (perlindungan agama) dan *Hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), selain pada kontekstual dan toleran dalam menanggapi fenomena ini, mereka juga menekankan bahwa masyarakat harus dibimbing untuk memahami siapa yang berhak menerima subsidi, agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang akibat krisis kesadaran.

2. Pada penelitian ini disisi lain juga ditemukan juga adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan, corak pemikiran, dan strategi antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menanggapi penyalahgunaan gas elpiji bersubsidi oleh masyarakat mampu. Tokoh-tokoh Muhammadiyah cenderung bersikap lebih normatif, tegas, dan legalistik dalam menilai bahwa tindakan tersebut sepenuhnya tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Sebaliknya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama mengambil pendekatan yang lebih kontekstual, sosial-kultural, dan edukatif. Mereka tidak langsung memberikan penilaian mutlak terhadap masyarakat mampu yang menggunakan gas elpiji bersubsidi, melainkan mempertimbangkan konteks seperti ketersediaan gas nonsubsidi dan ketidaktahuan masyarakat akibat lemahnya sistem informasi dan edukasi publik.

Perbedaan ini memperlihatkan dua wajah pendekatan Islam Indonesia yang saling melengkapi, Muhammadiyah dengan pendekatan rasional-modernis dan penekanan pada reformasi sistem negara, sedangkan Nahdlatul Ulama dengan pendekatan tradisional-humanis yang berakar pada kultur lokal dan kesadaran masyarakat. Perbedaan ini bukan bentuk pertentangan, melainkan kekayaan strategis yang, jika disinergikan, dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan sistem distribusi subsidi yang adil, tepat sasaran, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Saran

Setelah melihat hasil penelitian, terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan sebagai saran dari penulis. Peneliti berharap temuan

yang disajikan dapat menjadi kontribusi awal bagi kajian lebih lanjut mengenai isu yang dibahas. Penulis menyarankan agar penelitian di masa mendatang dapat mengeksplorasi aspek-aspek lain yang relevan dan memperdalam analisis menggunakan pendekatan yang lebih luas. Disisi lain garis kemiskinan ini masih memiliki multitafsir, yang artinya seseorang tidak mudah untuk dipandang sebagai kelompok miskin atau mampu, karena dinamika ekonomi saat ini sangat sulit untuk menyaring beragam kondisi ekonomi masyarakat. Maka dari itu sangat sulit menetapkan dan mengawal dari suatu hukum yang berkaitan dengan ekonomi seseorang.

Untuk keberlanjutan penelitian, penting kiranya untuk memperluas cakupan kajian dengan menganalisis lebih dalam fenomena penggunaan subsidi pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya terbatas pada gas elpiji bersubsidi. Penelitian lanjutan yang mencakup konteks daerah lain, variasi kelompok sosial, serta instrumen subsidi publik lainnya, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip Maqasid syari'ah dalam kebijakan distribusi sumber daya negara. Pendekatan ini akan memperkaya literatur fiqh muamalah kontemporer dan memperkuat kontribusi pemikiran Islam terhadap tata kelola subsidi yang berkeadilan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial-ekonomi masyarakat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Hadits

Abu Dawud, Kitab Sunan Abu Daud, Nomor hadits 3477, Bab: Bāb fi Man' al-Mā'

Al-Bukhori, *Shahih al-Bukhari*, (Dar al-Turath al-Islami, 2002)

An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, (Dar as-Salam, 2001)

Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2022

Keputusan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu Tepat Sasaran

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram

Fiqh dan Ushul Fiqh

‘Āsyūr, Muhammad bin al-Ṭahir, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyah*, cet. 1, (Dar al-Nafaes, 2001).

Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*. Jilid 2, (Lebanon: al-Risalah al-Nasirun, 2022).

Achmad Musyahid Idrus, “Korelasi Maqāshid Al-Syari’ah Dengan Metode Penetapan Hukum”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.12, No.1, (Januari 2014).

Ahmad ar-Raisuni, *Al-Fikr al-Maqashid*, (Maroko: Dar al-Baida, 1999)

Al-Falasi, A’lal , *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimiha*, Dar al-Garbi al-Islamiy, (1991).

Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh II*, Cet. 4. Jakarta: Kencana Permada Media Group (2008).

Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Jilid 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).

Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1990), Juz 3.

Iqbal, M. "Maqāṣid al-Syari’ah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam." *Jurnal Hikmah*, Vol.16, No.2 (2019).

M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958).

Syauqi Dhoif, *Al-Mu'jam al-Wāsiṭ*, (Kairo: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Maktabah al-Shuruq, cet. ke-5, 2004), jilid 2

Toriquddin, Moh. "Teori Maqāshid Syarī'ah Perspektif Asy-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, Vol.6, No.1 (2014).

Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

Buku

A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 78; lihat juga *Jurnal Al-Mashlahah* Vol. 2 No. 1 (2016).

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Asy-Syatibi* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada)

Djoni S Gozali, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2021)

Hamka Haq, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007)

Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008).

Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

Noeng Moehajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-7 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998).

Sajogyo, *Kemiskinan dan Pembangunan di Pedesaan*, (Jakarta: LP3ES, 1988)

Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Jurnal

Abdurrahman Kasdi, “Maqasid al-Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Yudisia*, Vol.5, No.1, (Juni 2014).

Agus Pakpahan, “Warisan Prof. Dr. Sajogyo di Bidang Pangan dan Gizi Rakyat dan Reaktualisasinya untuk Mewujudkan Kemerdekaan Petani dan Kemerdekaan Bangsa Dewasa Ini”, Bogor: Sajogyo Institute, Sajogyo Lecture kedua disampaikan pada 30 September 2020

Ahmad, R. “Analisis Konsumsi Elpiji 3 Kg oleh Rumah Tangga Mampu.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.12, No.2, (2021), hlm.150–162.

Amir Mahmud, Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo Tentang Kemiskinan Dalam Perspektif Agraria Kritis, *Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 5, No. 1, (Mei 2019)

Arif Takdir dkk, Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Di Kabupaten Aceh Barat Daya, *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol.1, No. 4, (November 2013)

Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pemikiran Muhammad Ṭāhir Ibn 'Āshūr", *Jurnal: Al-Maslahah*, Vol.13, No.1, (April, 2017).

Dewi Erfiani, Anggar Kaswati, & Suharman, "K.H Hasyim Asy'ari dan Peranannya dalam Membangun Organisasi Nahdlatul Ulama tahun 1926-1947." *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol.1, No.2, (2020).

Fadhilah Bakri dkk, "Penjualan Liquefied Petroleum Gas Subsidi kepada Masyarakat Selain Kategori Miskin Perspektif Syariah (Studi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007)", *Jurnal kajian Islam: Al Fikroh*, Vol.1 No.1, (Juli 2024).

Fathonah K. Daud & Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian atas Strategi Fatwa dalam Tradisi Bahts al-Masail di Indonesia." *Millennial: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.2, No.1, (2022), hlm. 1–22.

Gracia Montolalu dkk., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalagunaan Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas 3 Kg Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001", *Jurnal Fakultas Hukum, UNSRAT*, Vol.12, No.5, (November 2024).

Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol.15, No.1, (2021).

Lya Novaria Nainggolan dkk, “Tinjauan kebijakan pemerintah bagi masyarakat prasejahtera dalam menghadapi fenomena subsidi listrik, bahan bakar minyak, dan gas di Indonesia”, *Jurnal ekonomi pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, Vol.10, No.1, (Juni 2024).

Muh. Jamal dan Muh. Aziz, Metodologi Istimbath Muhammadiyah Dan Nu: (Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masail), *Jurnal: UNIDA Gontor*, Vol. 7 No. 2, (2013).

Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Pemikiran Abu Ishaq Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *Jurnal Al-daulah*, Vol.4, No.2, (Desember 2015).

Mustofa, A. A., & Khotimah, A. N., "Kyai Haji Ahmad Dahlan: Pendiri Muhammadiyah dan Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal: TSAQOFAH*, Vol.5, No.2, (2025), hlm.1505–1515.

Robby Kurniawan, “Maqasid Syariah dan Pembangunan Hak Asasi Manusia”, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, Vol. 6, No.2, (Desember2018)

Siregar, D., “Evaluasi Subsidi LPG 3 Kg dalam Perspektif Keadilan Sosial.” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.8, No.1, (2020), hlm.45–57.

Siti Hajar dan Nuraini, “Analisis Kepatuhan Pemilik Pangkalan LPG PT Kuta Naga Gas Terhadap HET yang Telah Ditetapkan Pemerintah dalam Penjualan Gas Subsidi Aceh Selatan”, *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No.1, (2024)

Sri Ratna Dewi dkk, “Pengawasan Pendistribusian Gas Elpiji 3kg bersubsidi di Kota Batam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Universitas Internasional Batam*, Vol.10, No.1, (Juni 2023)

Suhadi, S., "Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah: Sejarah, Fungsi, dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.28, No.2, (2018), 175–190.

Syufa'at. "Implementasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal: Al-Ahkam*, Vol. 23, No. 2 (2013)

Zulfahmi, "Maqosid Syariah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal: Ekonomi Islam*, STAIN Mandailling Natal, (2024)

Skripsi

Amalia, Sandra Rizka, “Penetapan Harga Gas Elpiji 3 Kilogram Di Tingkat Pangkalan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Tahun 2022)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Fatwamati Soekarno Bengkulu (2022).

Eriani, “Evaluasi Pendistribusian Gas LPG di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare (2020).

Huda, M. N., *Studi Pemanfaatan LPG 3 Kg di Kalangan Masyarakat Mampu*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, (2019).

Riana Arisa, “Problematika Jual Beli Gas Elpiji Bersubsidi Oleh Masyarakat Mampu Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2019).

Sari, D. P., *Pemanfaatan Gas LPG sebagai Energi Rumah Tangga di Indonesia*. Skripsi, Universitas Brawijaya, (2018).

Website

Adhyasta Dirgantara dan Jessi Carina, “Prabowo beri instruksi pengecer bisa jual elpiji 3kg lagi mulai hari ini”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/09343881/prabowo-beri-instruksi-pengecer-bisa-jual-elpiji-3-kg-lagi-mulai-hari-ini>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Admin Kalurahan Sendangsari Pajangan Bantul, “14 Kriteria Masyarakat Miskin menurut Standar BPS”, <https://sendangsari.bantulkab.go.id/first/artikel/724-14-KRITERIA-MASYARAKAT-MISKIN-MENURUT-STANDAR-BPS>, diakses pada tanggal 26 Februari 2025.

Admin, “Bukan Kategori Miskin tapi gunakan gas dan BBM bersubsidi”, <https://www.mui.or.id/baca/berita/bukan-kategori-miskin-tapi-gunakan-gas-dan-bbm-bersubsidi-apa-hukumnya>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

Al Hidayat Samsu, “Kelangkaan gas elpiji 3kg: Kebijakan yang tergesa-gesa yang mengorbankan rakyat kecil”, <https://mpr.go.id/berita/Kelangkaan-Gas-Elpiji-3-Kg:-Kebijakan-Tergesa-gesa-yang-Mengorbankan-Rakyat-Kecil>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Ananta, A., *Efektivitas Penyaluran LPG Bersubsidi dalam Menekan Beban Fiskal Negara*. Laporan Litbang. Bappenas, (2023).

Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, “Proyeksi Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Jiwa), 2024-2025”, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-yogyakarta-.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Badan Pusat Statistik, Data dan informasi kemiskinan kabupaten/kota di indonesia tahun 2024

Ilham, “Lima akibat berbuat zalim menurut al-qur’an dan hadis”, <https://muhammadiyah.or.id/2021/09/lima-akibat-berbuat-zalim-menurut-al-quran-dan-hadis/>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

Irfan Kamil dan Jessi Carina, “Sederet alasan pemerintah larang pengecer jual elpiji 3kg”, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/03/07432281/sederet-alasan-pemerintah-larang-pengecer-jual-elpiji-3-kg?page=all>, diakses pada tanggal 11 Maret 2025.

Jatengprov.co.id, “Bukan Masyarakat Miskin, Sekda Jateng Larang ASN Gunakan Elpiji 3 Kg”, <https://jatengprov.go.id/publik/bukan-masyarakat-miskin-sekda-jateng-larang-asn-gunakan-elpiji-3-kg>, diakses pada tanggal 18 Juni 2025

Joko Susanto, “Gas LPG 3 kg sempat langka, LPNU: tertibkan bukan agennya”, <https://www.nu.or.id/nasional/gas-lpg-3-kg-sempat-langka-lpnu-tertibkan-penerima-bukan-agennya-7eXzS>, diakses pada tanggal 24 Februari 2025.

Kementerian ESDM RI, “Atur Ketat Kelola Elpiji Subsidi”, <https://esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/-atur-ketat-kelola-elpiji-subsidi>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025

Kementerian ESDM, *LPG dan Manfaatnya untuk Kesehatan dan Lingkungan*, <https://www.esdm.go.id>, (2021), diakses pada tanggal 13 Maret 2025

Kementerian Keuangan, "Kemenkeu: Subsidi BBM Tak Tepat Sasaran, Dinikmati Orang Kaya!", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230214/9/1628115/kemenkeu-subsidi-bbm-tak-tepat-sasaran-dinikmati-orang-kaya>. Diakses pada tanggal 26 Mei 2025

Kementerian Sosial RI, *Integrasi Data Subsidi LPG dan DTKS*, (2023).

Kompas, “Pemerintah Dinilai Tidak Serius Kurangi Ketergantungan Elpiji”, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/13/pemerintah-dinilai->

[tidak-serius-kurangi-ketergantungan-elpiji](#), diakses pada tanggal 13 Maret 2025

Law-Justice.co., “*Problematika Subsidi Energi di Indonesia*”, <https://www.law-justice.co/artikel/171358/problematika-subsidi-energi-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025

Majelis Ulama Indonesia, Bukan Kategori Miskin tapi Gunakan Gas dan BBM Bersubsidi apa Hukumnya, <https://www.mui.or.id/baca/berita/bukan-kategori-miskin-tapi-gunakan-gas-dan-bbm-bersubsidi-apa-hukumnya>, diakses pada tanggal 5 Mei 2025

NU Online, <https://www.nu.or.id/lapsus/pcnu-bantul-dan-gerakan-pengembangan-kesejahteraan-nahdliyin-melalui-koin-nu-U8nDW>, diakses pada tanggal 15 Mei 2025

PCM Bantul, <https://pcmbantul.id/sejarah-pimpinan-cabang-muhammadiyah-bantul/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2025

Tempo.co., “ESDM akan terapkan penyaluran subsidi elpiji secara langsung”, <https://www.tempo.co/ekonomi/esdm-akan-terapkan-penyaluran-subsidi-elpiji-secara-langsung--664392>, diakses pada tanggal 13 Maret 2025.

Ujang Hasanudin, “Ini penyebab terjadinya kelangkaan elpiji 3 kilogram di Bantul”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/16/511/1204332/ini->

[penyebab-terjadinya-kelangkaan-elpiji-3-kilogram-di-bantul](#), diakses
pada tanggal 26 Februari 2025.

Wawancara

Wawancara dengan Drs. H. Bambang Inanta, MA., Wakil Ketua PDM Kabupaten
Bantul, tanggal 20 Maret 2025, di Kediaman

Wawancara dengan H. Aris Samsugito, S.Ah., Sekretaris PDM Kabupaten Bantul,
tanggal 24 Maret 2025, di KUA Srandakan

Wawancara dengan Sugeng Prihatin, S.H., Wakil Ketua PDM Kabupaten Bantul,
tanggal 24 Maret 2025, di Kantor BAZNAS Bantul

Wawancara dengan H. Suwandi DS, Wakil Ketua PDM Kabupaten Bantul, tanggal
23 April 2025, di Kantor PT MPN Gramasurya

Wawancara dengan Chusnul Azhar, M.Pd.I., Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM
Kabupaten Bantul, tanggal 29 April 2025, di Kantor PDM Bantul

Wawancara dengan Drs. H. Marhadi Fuad, M.Si., Wakil Ketua PCNU Kabupaten
Bantul, tanggal 1 Maret 2025, di Kantor PCNU Bantul

Wawancara dengan Drs. KH. Syahroini Djamil, Wakil Ketua PCNU Kabupaten
Bantul, tanggal 1 Maret 2025, di Kantor PCNU Bantul

Wawancara dengan Prof. Dr. H. Riyanto, M.Hum., Ketua PCNU Kabupaten
Bantul, tanggal 1 Maret 2025, di Kediaman

Wawancara dengan Drs. KH. Damanhuri, Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bantul,
tanggal 2 Maret 2025, di Kediaman

Wawancara dengan Dr. KH. Anis Masduqi, Lc., M.Si, Ketua Lembaga Bahtsul
Masail PWNU DIY, tanggal 24 Mei 2025

